

VOLUME 1 NOMOR 2 JUNI 2024		
Diterima: 27 Mei 2024	Direvisi: 29 Mei 2024	Disetujui: 3 Juni

The Influence of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth: A Case Study in the Context of Macroeconomics

Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Studi dalam Konteks Ekonomi Makro

Puput Iswandyah Raysharie¹, Rio Alviandi², Ester Talenta Novjalia Marbun³, Laura Reyna Adelia Sirait⁴, Nadya Azzahra⁵, Riska Mawardani⁶, Syifa Aulia⁷

Universitas Palangka Raya^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: raysharie@feb.upr.ac.id¹, rioalviandi86@gmail.com², esterpjm@gmail.com³, laurasirait345@gmail.com⁴, nadyazsr16@gmail.com⁵, riskamawardani696@gmail.com⁶, syfliacreation@gmail.com⁷

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates on Economic Growth. Through literature analysis, this study compiles a detailed understanding of how Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates can shape and affect economic growth. The research presents the main findings from relevant literature, focusing on key factors mediating the relationship between Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates on Economic Growth. This abstract conclusion could serve as a basis for further research. The research results indicate a positive correlation between Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates on Economic Growth.

Keywords: Government expenditure, taxation, money supply, interest rates, economic growth

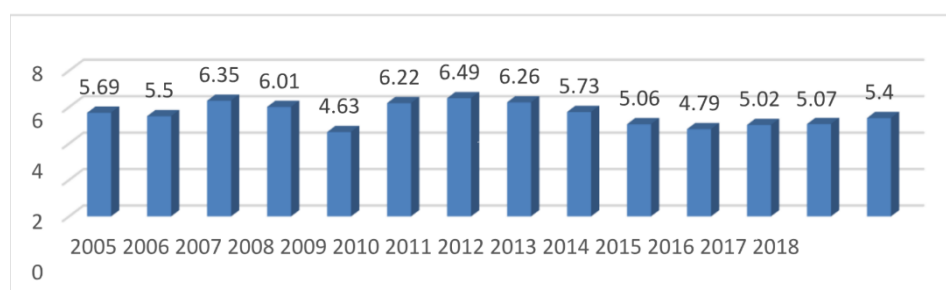
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Melalui analisis literature, penelitian ini menyusun pemahaman terperinci tentang bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga dapat membentuk dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memaparkan temuan utama dari literature terkait, berfokus pada faktor-faktor kunci yang memediasi hubungan Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kesimpulan abstrak ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan positif antara Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : Pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, suku bunga, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan dan menetapkan arah pembangunan masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, sementara penurunan pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi. Peningkatan ekonomi merupakan tujuan nasional yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan kapasitas nasional. Selain itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi fokus utama bagi semua negara, baik yang maju maupun berkembang, karena dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan modal dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran. (Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto, 2020). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2005-2018, sebagaimana yang terlihat dalam data yang diperoleh dari Bank Indonesia, menunjukkan sifat fluktuatif. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak konsisten dalam menunjukkan peningkatan dan kemajuan dalam perekonomian Indonesia. Diagram yang disajikan menggambarkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode tersebut.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2005-2018

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Gambar 1 menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69%, namun mengalami penurunan menjadi 5,5% pada tahun 2006. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 6,35%, namun kemudian kembali menurun hingga mencapai nilai terendah dalam 13 tahun pada tahun 2009, dengan angka 4,63%. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak dari krisis global pada akhir tahun 2008, yang memberikan risiko dan tantangan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian guna menciptakan pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2010 dengan 6,22%, yang meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 6,48%. Namun, peningkatan ini hanya berlangsung selama dua tahun, karena pada tahun 2012 terjadi penurunan kembali menjadi 6,26%. Pertumbuhan ini berlanjut hingga 2015, mencapai titik terendahnya setelah tahun 2009 dengan 4,79%. Setelah fase rendah pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada tahun 2016 dengan 5,02% dan 5,07% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhannya mencapai 5,4%. Fluktuasi nilai dalam beberapa industri bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalam negeri juga memainkan peran penting. Sebagaimana ditunjukkan oleh Zakik (2013:59), tantangan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan pemerintah, yang harus diidentifikasi dengan benar untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter dan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi Indonesia.

Menurut Nopirin dan Herlina (2018:139), kebijakan moneter, yang diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral independen, sangat memengaruhi ekonomi negara. Salah satu faktor penting yang memengaruhi jumlah uang beredar adalah suku bunga yang

ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai standar bagi lembaga perbankan di Indonesia. Misalnya, penurunan suku bunga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengambil kredit untuk keperluan investasi dan konsumsi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat mengurangi minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia, yang dapat mengurangi investasi domestik. Jumlah uang beredar (M2), yang merupakan instrumen kebijakan moneter tambahan, harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menyebabkan inflasi yang tinggi. Ada dua jenis kebijakan moneter yang mungkin diterapkan di Indonesia: kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga, sedangkan yang kedua bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Kebijakan fiskal adalah bagian penting dari manajemen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengawasi kebijakan fiskal, yang mencakup perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong perekonomian pada saat resesi dan tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk memperlambat perekonomian. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai. Meskipun kebijakan fiskal dan moneter mungkin tidak saling bertentangan dalam jangka panjang, koordinasi antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan memastikan pengendalian defisit pengeluaran pemerintah agar inflasi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan (Simorangkir, 2007:6; Safriadi, dkk, 2014:86). Wa Tima Mega (2021) mengatakan pajak adalah kontribusi wajib negara yang diutang oleh individu atau organisasi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin. Menurut Estro Dariatno Sihalo (2020), pajak memiliki peranan yang signifikan dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi operasional pemerintahan. Pajak mempunyai peran yang signifikan dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Temuan dari beberapa peneliti, seperti Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto (2020), Estro Dariatno Sihalo (2020), Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi, Parmadi (2021), menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Dyah Ayu Mustika Rini, Herry Yulistiyono (2021), yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Ada dua faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS). Permintaan agregat mengacu pada total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian, sedangkan penawaran agregat mengacu pada total penawaran barang dan jasa. Dari perspektif permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan dalam perekonomian. Namun, dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi dilihat dari segi produksi. Seiring berjalannya waktu, banyak teori yang muncul untuk

menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi, masing-masing dengan pendekatan dan asumsi yang berbeda.

Teori klasik mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dalam perekonomian persaingan sempurna. Simon Kuznets dan Jhingan (2002) memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini bukan hanya hasil dari adaptasi teknologi dan kelembagaan, tetapi juga dari sikap dan upaya yang diperlukan oleh masyarakat. Peningkatan produk nasional yang terus-menerus adalah salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini. Selain itu, ideologi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah

Teori "efek crowding-out" yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman menunjukkan bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, masyarakat mungkin enggan untuk membayar pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak pemerintah. Dalam pandangan Keynesian, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai salah satu komponen dari permintaan agregat, yang merupakan total permintaan barang dan jasa dalam ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap permintaan agregat. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yang merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui penetapan pendapatan dan belanja. Sadono Sukirno (2006) menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Dokumen APBN nasional dan APBD daerah/provinsi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan rencana pengeluaran dan pendapatan tahunan mereka.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah diatur dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi). Menurut Nahumuri (2019), pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Selain itu, menurut Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, maka permintaan agregat juga akan meningkat. Hal ini karena pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.

Pajak

Pajak ialah bagian berarti dari pemasukan pemerintah serta membagikan donasi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan yang dicoba negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pemasukan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan begitu besar sehingga penerimaan pajak bisa pengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Karena tingginya penerimaan pajak yang diterima pemerintah mempermudah tercapainya pemerataan pembangunan dengan membenarkan tersedianya pendanaan yang lumayan serta roda pemerintahan berjalan lancar. Penelitian lebih dahulu sudah menampilkan ikatan antara penerimaan pajak serta tingkatan perkembangan ekonomi di Pakistan, Mashkor, Yahya serta Saeed (2010).

Dalam uraian pajak dalam undang-undang perpajakan Indonesia langsung disebutkan "kekayaan negeri", perihal ini cocok dengan khasiat pajak yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pajak bersumber pada undang-undang yang terdapat memiliki ikatan ataupun ikatan dengan benda publik, serta pengelolaan fiskal yang transparan serta efektif wajib jadi prasyarat buat penciptaan kekayaan (Simanjuntak & Mukhlis, 2011b). Pajak ialah salah satu sumber pemasukan pemerintah serta berfungsi berarti dalam membiayai pembangunan serta menampilkan kemandirian ekonomi. Dikenal kalau dalam anggaran pemasukan serta belanja negeri (APBN), pajak ialah salah satu komponen pemasukan negeri (Simanjuntak serta Mukhlis, 2012).



Jumlah Uang Beredar

Berdasarkan Natsir (2014), uang yang beredar dimaksud selaku kewajiban sistem moneter kepada zona swasta dalam negeri. Hubbard dkk (2005) melaporkan bahwasanya jumlah uang beredar yang beredar merupakan “total jumlah uang beredar dalam perekonomian”. Ditafsir secara leluasa, uang yang beredar merupakan jumlah ataupun totalitas jumlah uang yang terdapat dalam perekonomian. Uang memiliki sebagian guna dalam aktivitas perekonomian. Pertama uang berperan selaku alat tukar antara pembeli serta penjual (Huda et al, 2018). Uang bisa digunakan selaku alat tukar untuk mendapatkan bermacam tipe benda serta jasa. Oleh sebab itu, memakai uang membuat transaksi jadi lebih mudah untuk seluruh masyarakat.

Kedua, uang berperan selaku satuan hitung, satuan yang dipakai untuk mengukur nilai bermacam tipe benda. Nilai sesuatu barang bisa dinyatakan lewat biayanya. Ketiga, selaku ukuran pembayaran di masa depan dalam transaksi penjualan dengan tata cara pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payment standard*), H. Pembeli menerima benda terlebih dulu serta pembayaran dicoba belum lama. Keempat, selaku perlengkapan penumpukan kekayaan (Ambarwati et al 2021).

Suku Bunga

Suku bunga merupakan bunga yang dinyatakan dalam persentase sepanjang jangka waktu tertentu (bulanan ataupun tahunan). Bunga ialah dimensi harga sumber energi yang digunakan oleh debitur serta wajib dibayarkan kepada kreditur. Bunga pula sediakan kelebihan uang ataupun satker buat digunakan sedangkan oleh pihak yang membutuhkan serta memakai uang tersebut buat mengubah satker yang lenyap ataupun lenyap dimengerti pula selaku pemasukan masyarakat yang memerlukannya (Judisseno, 2005: 80).

Suku bunga memiliki akibat yang signifikan terhadap pasar serta harga (pasar keuangan serta pasar modal) serta dinyatakan selaku tingkatan persentase tahunan bersumber pada uang yang dipinjam warga (Indriyani, 2016). Keadaan ini kerap dimanfaatkan oleh pemerintah buat mengendalikan peredaran uang (Indriyani, 2016). Hasil ini tidak berubah-ubah dengan teori kalau suku bunga besar merendahkan tingkatan investasi serta perkembangan ekonomi. Di sisi lain, suku bunga yang lebih rendah bisa mendesak lebih banyak investasi serta mendesak perkembangan ekonomi (Sadono, 2010).

Berdasarkan Sukirno (1994), tingkatan bunga ialah aspek berarti dalam perekonomian, serta tingkatan bunga ialah bayaran modal yang wajib dibayar investor apabila memakai modal utang (Sely, 2020). Menurut Sunariyah (2004), tingkatan bunga merupakan harga pinjaman. Bunga ialah dimensi harga sumber energi yang digunakan oleh debitur serta wajib dibayarkan kepada kreditur (Permatasari, 2015) suku bunga ialah salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diawasi secara ketat sebab akibatnya yang luas. Hal ini berakibat langsung pada kehidupan sehari-hari warga serta memiliki implikasi berarti untuk kesehatan perekonomian (Fahrika, 2016). Menurut Mahendra (2016) (Ningsih & Kristiyanti, 2019) suku bunga merupakan harga yang wajib masyarakat bayarkan pada sesuatu transaksi pertukaran dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode tinjauan literatur yang diterapkan dalam penelitian ini berpusat pada pengumpulan dan analisis data terkait variabel-variabel kunci, yaitu pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Fokus utama penelitian ini adalah menjelajahi literatur-literatur yang membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mencari dan mengevaluasi publikasi-publikasi ilmiah, buku, dan artikel-artikel terpercaya yang menguraikan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam tinjauan literatur ini, konsep-konsep teoretis dan temuan-temuan empiris yang relevan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian disusun dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana variabel-variabel tersebut dapat



mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk menyajikan tinjauan yang komprehensif tentang pengaruh variabel-variabel tersebut dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah/regional. Heni Rahmawati (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya dalam mendukung berbagai kegiatan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur baru yang memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Anggaran yang ditetapkan juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan guna mendukung sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat provinsi. Menurut Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat, karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, peran pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat penting karena keterbatasan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peran pemerintah tetap signifikan dalam perekonomian. Peningkatan permintaan juga berarti terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan pemerintah terkait pengeluaran memiliki dampak yang penting pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 28 ayat 4, dalam situasi darurat, Pemerintah Daerah diizinkan untuk melakukan pengeluaran tanpa anggaran yang tersedia, dengan syarat akan diusulkan dalam perubahan APBD dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Investasi dalam infrastruktur adalah salah satu aspek utama dari kebijakan ini. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem transportasi yang efisien dan energi yang handal, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya, infrastruktur yang baik dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Selain infrastruktur, investasi dalam sumber daya manusia juga merupakan bagian penting dari kebijakan pengeluaran pemerintah. Dana yang dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan memiliki peran krusial dalam mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Tenaga kerja yang terdidik dan sehat cenderung lebih inovatif dan produktif, yang pada akhirnya dapat membantu memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, dan Audie O. Niode (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi ketika dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum yang memperkuat aktivitas perekonomian, seperti pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya juga berperan penting. Dengan demikian, pengangguran dapat berkurang, pendapatan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki peranan krusial dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Dalam penyusunan APBN dan APBD, pemerintah menetapkan besarnya penerimaan dan pengeluaran sebagai strategi untuk memengaruhi pertumbuhan



ekonomi. Kontribusi pengeluaran pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program padat karya, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang bijaksana dan tepat sasaran memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif.

Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak memegang peran yang sangat vital dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan publik, pajak menjadi pilar utama dalam pembentukan kebijakan ekonomi suatu negara serta dalam memperkuat posisi negara tersebut dalam persaingan global. Setiap pemerintah berusaha keras untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang mencukupi untuk membiayai segala kebutuhan negara, sehingga pemerintah tidak perlu mengandalkan pinjaman dari pihak lain. Namun, adanya tarif pajak yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi ketika pendapatan masyarakat digunakan untuk membayar pajak yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi, yang pada akhirnya merugikan perekonomian. Meskipun beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Panji Kusuma Prasetyanto (2020) dan Estro Dariatno Sihalo (2020), menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hasil penelitian lain yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mustika Rini dan Herry Yulistiyono (2021), misalnya, menyatakan bahwa pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara di mana kebijakan pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah melalui penerapan tarif pajak terhadap pendapatan individu dan perusahaan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1, pajak dijelaskan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang dikenakan kepada individu atau badan secara paksa sesuai dengan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Tarif pajak yang tinggi cenderung mengurangi dorongan untuk bekerja, berinvestasi, dan berusaha, karena individu dan perusahaan memiliki insentif yang lebih rendah untuk mencari pendapatan lebih tinggi jika sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat merangsang aktivitas ekonomi dengan mendorong individu untuk bekerja lebih keras, menginvestasikan lebih banyak dana mereka, dan memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, kebijakan penggunaan pendapatan pajak juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara langsung mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas modal manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto (2020), Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi, Parmadi (2021) menunjukkan bahwa pajak berperan positif dan signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini menyiratkan bahwa tingkat penerimaan pajak yang tinggi atau rendah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pengaruh yang signifikan. Peran penting pajak dalam perencanaan pembangunan suatu negara terungkap, dimana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan publik, tetapi juga menjadi landasan kebijakan ekonomi untuk mengatur dan meningkatkan keunggulan suatu negara dalam persaingan global. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bertujuan untuk mendanai pengeluaran negara tanpa harus mengandalkan pinjaman dari pihak lain.

Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Angelica Putri Wijaya (2021), jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang yang dikeluarkan dan didistribusikan oleh Bank Sentral, terdiri dari uang logam dan uang kertas (uang kartal). Konsep jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 meliputi uang giral,



uang kartal, serta uang kuasi seperti tabungan dan simpanan berjangka. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena masyarakat akan lebih cenderung untuk mengalokasikan sebagian dana mereka untuk konsumsi, yang pada gilirannya mendorong produsen untuk meningkatkan produksi barang dan meningkatkan permintaan atas faktor produksi. Penelitian oleh Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto (2020) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan merangsang konsumsi dan produksi barang. Hasil ini bertentangan dengan temuan dari penelitian oleh Wiwiet Aji Prihatin, Arintoko, Suharno (2019), yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang beredar memiliki peran krusial dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, diamanatkan bahwa jumlah uang yang beredar harus dijamin sebesar 20% dengan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri. Jumlah uang beredar, yang meliputi uang tunai dan simpanan di bank, memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi dengan mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan tingkat investasi. Pengendalian jumlah uang beredar dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Salah satu instrumen utama untuk mengatur jumlah uang beredar adalah pengendalian suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan meningkat, mendorong individu dan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi, yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat merangsang pinjaman dan pengeluaran, meningkatkan jumlah uang beredar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kepentingan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar terletak pada manajemen inflasi. Jika pertumbuhan jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan output ekonomi secara berlebihan, dapat menyebabkan inflasi yang merugikan, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, jika jumlah uang beredar terlalu rendah, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi ketersediaan kredit dan investasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan distribusi uang yang beredar agar mencerminkan kebutuhan ekonomi yang sebenarnya. Contohnya, memastikan akses kredit tersedia untuk sektor-sektor penting seperti usaha kecil dan menengah dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Temuan analisis ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Ambarwati, Sara, dkk (2021), yang menegaskan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkat. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar, masyarakat akan cenderung mengalokasikan sebagian dana mereka untuk konsumsi, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi barang, dan pada gilirannya meningkatkan permintaan akan faktor produksi. Dampak dari hal ini akan mencakup peningkatan konsumsi, produktivitas pengusaha, dan pendapatan per kapita, yang kemudian akan menguatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang beredar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepentingan jumlah uang yang beredar dalam konteks pertumbuhan ekonomi terletak pada pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dan produsen. Secara umum, peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong konsumsi, menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa oleh produsen, yang kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap faktor produksi.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Suku bunga adalah aspek ekonomi yang terus dipantau karena memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta memiliki peran krusial dalam kesehatan ekonomi.



Menurut penelitian oleh Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, dan Panji Kusuma Prasetyanto (2020), suku bunga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun temuan tersebut berbeda dengan penelitian lain yang menunjukkan dampak negatif suku bunga dalam jangka pendek. Kasmir (2022) juga mengemukakan bahwa suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah (penyimpanan) kepada bank (pemberi pinjaman), serta merupakan harga dalam transaksi penukaran mata uang dengan selisih waktu tertentu. Kenaikan suku bunga yang tidak wajar dapat menyulitkan bisnis dalam membayar bunga dan hutang, sehingga berpotensi mengurangi keuntungan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan moneter yang efektif untuk mengatur suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Indira Avisha Lantemona, Rosalina, A.M. Koleangan, dan Een N. Walewangko (2020).

Kebijakan pemerintah yang menurunkan suku bunga dapat menggalakkan aktivitas ekonomi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 mengatur ketentuan tentang suku bunga pinjaman yang diberlakukan oleh lembaga keuangan mikro, dengan batasan suku bunga tidak boleh melebihi 6% per tahun, bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keterjangkauan bagi peminjam. Penurunan suku bunga merangsang konsumen untuk meminjam lebih banyak untuk berbagai pembelian dan mendorong perusahaan untuk mengambil pinjaman untuk perluasan usaha. Ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas inflasi saat menetapkan kebijakan suku bunga, karena suku bunga yang terlalu rendah dapat mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali, sementara suku bunga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan deflasi dan merugikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang suku bunga harus seimbang, mempertimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas harga. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Achmad Fuzi, Prisila Damayanty, Citra Swantika Pane, dan Eka Amelia Chiesa Julianti (2023), yang menegaskan bahwa suku bunga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memengaruhi tingkat investasi, di mana suku bunga yang rendah mendorong peningkatan investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mengurangi minat pemilik modal untuk mengalokasikan dana mereka ke perusahaan yang berpotensi, sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi cenderung meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan konsep bahwa suku bunga yang tinggi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa suku bunga memainkan peran yang vital dalam pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dikaji dalam jurnal ini mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga terhadap pertumbuhan ekonomi, ditemukan bahwa terdapat keterkaitan positif antara faktor-faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun terdapat hasil penelitian yang berbeda terkait dampak dari faktor-faktor tersebut, namun secara umum, Pajak, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pajak, sebagai sumber utama pendapatan publik, memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, peningkatan jumlah uang beredar dan suku bunga yang wajar juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Suku Bunga yang tinggi dapat menurunkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam merumuskan kebijakan ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan suku bunga juga diperlukan untuk



memastikan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami dampak dari faktor-faktor tersebut dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kesimpulan dari jurnal ini menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta peran penting dari faktor-faktor seperti Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hakim, T., Karia, A. A., David, J., Ginsad, R., Lokman, N., & Zolkafli, S. (2022). Impact Of Direct And Indirect Taxes On Economic Development: A Comparison Between Developed And Developing Countries. *Cogent Economics And Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2141423>
- Adya Utami. (2019). Determinan Jumlah Uang Beredar, Tingkat Bunga, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Ahamed Sharmin Mohsen, Dr. Faisal Abdus Hoang, P., & Dr. Abir Fahim Tariq. (2022). Effect Of Interest Rates On Economic Growth In Bangladesh. *Journal Of Economics*, 6(1), 36–44. <https://doi.org/10.53819/81018102t5086>
- Ahmad R, Puput Iswandyah R, Et Al (2023). “Pengaruh Sistem Transaksi Kartu Kredit Dan Debit, Uang Elektronik, Dan M-Banking Terhadap Permintaan Tunai”. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. 1 Issue 5 Pages 478-491
- Andika Pratama, R., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Anggie, H., Luhfiana, S., Lintang Ayuninggar, I., & Mumtaz, J. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia (Vol. 13).
- Aristina, K., Juliprijanto, W., Panji, J., Prasetyanto, K., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005-2018 Analysis Of Monetary Policy And Fiscal Policy On Economic Growth In Indonesia 2005-2018.
- Benius, Puput Iswandyah R Et Al (2024). “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk, Harga, Dan Promosi”. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*. Vol 7 Issue 2 Pages 3090-3098
- Bourdane, Y., & Fahim, O. (2019). Tax Revenue And Economic Growth In Morocco: Application Of Ardl Approach. <https://www.researchgate.net/publication/334151742>
- Buterin, D., Drezgić, S., & Buterin, V. (2023). Changes In The Tax Structure And Their Impact On Economic Growth In The Republic Of Croatia Based On The Var Model. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677x.2022.2158114>
- Dampak Pengeluaran Pemerintah, A., Kab, S., Jawa Timur Abstrak Ekonomi -Akuntansi, K. Di, & Andi Wijaya, F. (2021). Nama | Npm Fak-Prodi.
- Fauzi, A., Damayanty, P., Swantika Pane, C., Amelia, E., Julianti, C., Putri Elok, G., & Rivai, I. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Vol. 2, Issue 2).
- Habib Saragih, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia The Effect Of Tax Revenue On The Economic Growth In Indonesia. *Sikap*, 3(1), 17–27. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/Sikap>
- Hariyanti, D., & Soeharjoto, V. (2022, January 21). Impact Of Monetary Policy On Indonesia's Economic Growth, Case Studies Before And During The Covid-19 Pandemic. <https://doi.org/10.4108/Eai.3-8-2021.2315159>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Diakses Pada 22 Maret 2024 Dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/89tahun2014pp.htm>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang (Uu) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diakses Pada 22 Maret 2024 Dari Uu No. 17 Tahun 2003



- (Bpk.Go.Id).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Diakses Pada 22 Maret 2024 Dari 28-07.Pdf (Bpkp.Go.Id).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953). Diakses Pada 22 Maret 2024 Dari <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/41699/Uu%20nomor%2084%20tahun%201958.Pdf>.
- Irawan, Puput Iswandyah Et Al (2024). "Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 Issue 1 Pages 98-106.
- Irawan, Puput Iswandyah R, Et Al (2023). "Dampak Investasi Asing Dan Dalam Negeri Terhadap Ekspansi Ekonomi Di Kalimantan Timur". Borjouis: Jurnal Of Economy. Vol 1 Issue 1 Pages 151-162.
- Irawan, Puput Iswandyah R, Et Al (2023). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Tengah", Capitalis: Journal Of Social Sciences. Vol 1 Issue 1 Pages 32-38.
- Khalifa Albaar Hanafi. (2020). Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Sadaqoh (Zis), Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2018. 1-17.
- Koyongian, C. L., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.
- Lantemona, I. A., Koleangan, R. A. M., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. In Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah (Vol. 21, Issue 2).
- Lesfandra. (2021). Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 7, 180-188.
- Lestari, M. T., Setiyanto, A. I., Bisnis, M., & Batam, P. N. (2021). Pengaruh Transaksi Non Tunai, Inflasi Dan Penerimaan Pajak Terhadap Perumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Journal Of Applied Managerial Accounting, 5(2), 56-66.
- M. Yazid Ar. (2019). Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Najmi, I., Adi, A. R., Arienal, D., & Zulha, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis, 1, 18-36.
- Novelya Mamuane, Josep B. Kalangi, & Krest D. Tolosang. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21, 205.
- Nur Widiastuti, & Samsubar Saleh. (2019). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Panel Data. 23, 13-28.
- Nur, W., Sari, I., Setyowati, E., Putri, S. M., & Faridatussalam, S. R. (2022). Analysis Of The Effect Of Interest Rates, Exchange Rate Inflation And Foreign Investment (Pma) On Economic Growth In Indonesia In 1986-2020.
- Omodero, C. O. (2019). Effect Of Money Supply On Economic Growth: A Comparative Study Of Nigeria And Ghana. International Journal Of Social Science Studies, 7(3), 16. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i3.4137>
- Penggunaan, P., Elektronik, U., Uang Beredar, J., & Wijaya, A. P. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik, Jumlah Uang Beredar, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 206-212.



- Puput Iswandyah R, Asti D, Et Al (2023). "Pemahaman Terhadap Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Peningkatan Pendapatan Perusahaan Melalui Kajian Literatur". Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi. Vol 2 Issue 7 Pages 133-143.
- Puput Iswandyah R, Dani P, Et Al (2023). "Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Vol 1 Issue 5 Pages 319-331.
- Puput Iswandyah R, Elisa P, Amsal A S (2023). "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Dan Ekspor Terhadap Sistem Nilai Tukar". Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Vol 1 Issue 5 Pages 415-426.
- Puput Iswandyah R, Irawan, Et Al (2024). "Analisis Efek Kualitas Layanan Dan Produk Terhadap Minat Beli Ulang Pelanggan E-Commere". Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset. Vol 2 Issue 1 Pages 158-171.
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Jurnal Stei Ekonomi, 31(02), 77–82. <https://doi.org/10.36406/Jemi.V31i02.745>
- Risky Meri Yosephina Siburian, & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 02, 88–97.
- Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, & Audie O. Niode. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). 19, 13–23.
- Rosemarina Anggraini Rambe, & Ratu Eva Febriani. (2020). Peran Belanja Pemerintah Dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Sumatera. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 3, 57–76.
- Sari, S., & Anggadha Ratno, F. (2020). Analisis Utang Luar Negeri, Suku, Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. <http://ejournal.unikama.ac.id/hal92>
- Setyo Budi, T., Rahmadi, S., & Parmadi. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Vol. 10, Issue 3).
- Tingkat, P., Bunga, S., Uang Beredar Terhadap Investasi, J., Pertumbuhan, D., Indonesia, E., Jumlah, D., Beredar, U., Sudirman, S., Hidayat, N., Uin, A., Makassar, A., & Rahman, A. (2022). Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Vol. 18).
- Tri Meliniati, Nurjannah, & Rinaldi Syahputra. (2023). Pengaruh Investasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Samudra Eonomika, 7, 224–232.
- Wa Tima Mega. (2021). Analisis Peranan Pajak Dalam Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia. 1–6. <https://doi.org/10.20885/Unisia.Vol13.Iss15.Art8>